

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MERENCANAKAN
PEMBANGUNAN DESA**

**(Studi di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Skripsi
Diajeng Sakhara Purnama
NPM: 1721020018**



Program Studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MERENCANAKAN
PEMBANGUNAN DESA**

**(Studi di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung
Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah



Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ.,M.Ag.

Pembimbing II : Rudi Santoso., M.H.I.,M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Mekanisme pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan Desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa dan masyarakat. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa dikaji dan hal itu merupakan hal yang utama, karena Desa yang maju dapat terlihat dari peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Disisi lain implementasi terkait pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Rangai Tritunggal seringkali tidak berjalan dengan hasil musyawarah.

Dari latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana mekanisme dan implementasi pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan Desa Rangai Tritunggal dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pengambilan keputusan oleh pemimpin/Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk meninjau serta menganalisis bagaimana mekanisme pengambilan keputusan Kepala Desa Rangai Tritunggal dan untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah dalam pengambilan keputusan Pemimpin dalam hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer diperoleh menggunakan teknik purposive sampling (non random) yaitu data dari responden langsung seperti: Kepala Dusun, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM, dan Pendamping Desa mengenai mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa, sedangkan data sekunder berupa teori-teori, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan monografi Desa serta berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif yang menghasilkan metode induktif yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan secara umum dan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Desa menggunakan musyawarah tingkat Dusun yang merupakan tahap awal dalam membahas berbagai permasalahan di setiap Dusun. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah tingkat Desa yang

merupakan tahapan analisis alternatif- alternatif yang kemudian akan diambil hasil akhir dari analisis tersebut yaitu keputusan yang akan diambil oleh Kepala Desa terkait masalah pembangunan. Pandangan fiqh siyasah tentang mekanisme yang digunakan dalam pengambilan keputusan di Desa Rangai Tritunggal sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam Islam, salah satunya dengan musyawarah yang dilakukan oleh Kepala Desa, melalui (MUSDUS) dan dilanjutkan (MUSDES).

Kata Kunci: Desa, Fiqh Siyasah Dusturiyah





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kode pos 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Merencanakan Pembangunan Desa (Studi di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)

Nama Mahasiswa : Diajeng Sakhara Purnama

NPM : 1721020018

Program Studi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syari'ah

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.
NIP. 195607271988031001

Pembimbing II

Rudi Santoso., M.H.I., M.H.
NIP. -

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

Frenki M. Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kode pos 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan).** Disusun oleh : **Diajeng Sakhara Purnama, Npm : 1721020018,** Program Studi : **Siyasah Syar’iyah (Hukum Tatanegara),** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Rabu, 30 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. Susiadi AS, M.Sos

Sekretaris : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A

Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ.,M.Ag.

Penguji III : Rudi Santoso., M.H.I.,M.H.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“dan orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

Q.S As-Syura (42):38



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang aku sayang :

1. Motivator terbesar dalam hidupku yang ku sayangi dan yang aku banggakan yaitu kedua orang tuaku, Ayahku (Drs. Isro Hajali) dan Mama (R.A Yunani) yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai aku meraih gelar sarjana. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas semuanya. Karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian Ayah dan Mamaku tersayang.
2. Kakak Pertamaku Dewi Sofia Purnama dan Kakak Kedua Dwi Restina Purnama, S.Sos para kaka ipar dan ke enam ponakan ku yang telah memberiku semangat serta memberikan dukungan, dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
3. Haris Ardiansyah, S.T. Alhamdulillah akhirnya kita bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih selalu ada selama empat tahun ini mendengarkan segala keluh kesahku dan membantuku dalam hal perskripsian. *See you on top!*
4. Teman-temanku yang tak bisa kusebutkan satu persatu. Khusus untuk sahabatku yang aku sayangi Tika Hidayanti, Indah Nailul, Nada Shaliha, Rizma Komala, Salsa, Nadiya, BSG dan kelas G terima kasih selalu memberikan bantuan, pengertian, dan semangat dalam penulisan skripsi ini, semoga segala urusan kalian dilancarkan sampai meraih gelar sarjana ya, maafkan aku yang wisuda duluan.
5. Dosen pembimbing 1 Bapak Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag yang mengajarkanku arti kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Dosen pembimbing 2 Bapak Rudi Santoso, M.H.I., M.H. yang dengan sabar memotivasi, mengarahkan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Diajeng Sakhara Purnama dilahirkan di Panjang Kota Bandar Lampung, pada tanggal 21 Maret 2000, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Drs. Isro Hajali dan Ibu R.A Yunani. Penulis memulai pendidikan di TK Setia Kawan Panjang Lulus tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri 2 Rangai Tritunggal Lulus tahun 2011, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) 1 Tanjung Karang Lulus tahun 2014, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung Lulus tahun 2017. Dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil program studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara) dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/1439 H.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di berbagai kegiatan intra maupun ekstra menjadi penyiar radio perwakilan UIN Raden Intan Lampung dalam program Broadcaster Academy yang dilaksanakan oleh Program 2 Radio Republik Indonesia (RRI Bandar Lampung).

Bandar Lampung,2021

Penulis

Diajeng Sakhara Purnama

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“TINJUAN FIQH SIYASAH TERHADAP MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insya Allah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag. Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rudi Santoso, M.H.I.,M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dengan penuh kesabaran dan dorongan serta motivasi kepada penulis agar semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan

Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.

7. Pimpinan perpustakaan dan karyawannya, baik Perpustakaan Fakultas maupun Perpustakaan Pusat yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini.
8. Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Desa Rangai Tritunggal yang telah banyak membantu untuk terselesainya skripsi ini.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan untuk menyempurnakannya. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan pada pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 2021
Penulis

Diajeng Sakhara Purnama
1721020018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
H. Metodologi Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemimpin dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	19
1. Pengertian Pemimpin	19
2. Dasar Konseptual Pemimpin Perspektif Islam.....	24
3. Syarat-Syarat Pemimpin.....	26
4. Tugas dan Kewajiban Pemimpin.....	27
5. Karakteristik Kepemimpinan Islam	30
B. Pemimpin Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.....	39
1. Pengertian Kepala Desa	39
2. Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD	41

3. Kewajiban Kepala Desa Dalam Pembangunan	44
4. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa	47

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Rangai Tritunggal	53
1. Sejarah Singkat Desa Rangai Tritunggal	53
2. Kondisi Umum Desa Rangaitritunggal	54
3. Stuktur Pemerintahan Desa Rangai Tritunggal	63
4. Visi dan Misi Desa Rangai Tritunggal	64
5. Tujuan dan Sasaran Desa Rangai Tritunggal	64
B. Implementasi Pembangunan Desa Rangai Tritunggal..	65
1. Mekanisme Pengambilan Keputusan Kepala Desa .	65
2. Program Pembangunan Desa Rangai Tritunggal	67
3. Faktor Pendukung Pembangunan Desa.....	70
4. Faktor Penghambat Pembangunan Desa	70

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Mekanisme Pengambilan Keputusan Kepala Desa Dalam Merencanakan Pembangunan Desa Rangai Tri Tunggal Prespektif Fiqh Siyasah.....	75
B. Temuan Penelitian Terhadap Mekanisme Pengambilan Keputusan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Rangai Tritunggal	78

BAB V PENUTUP

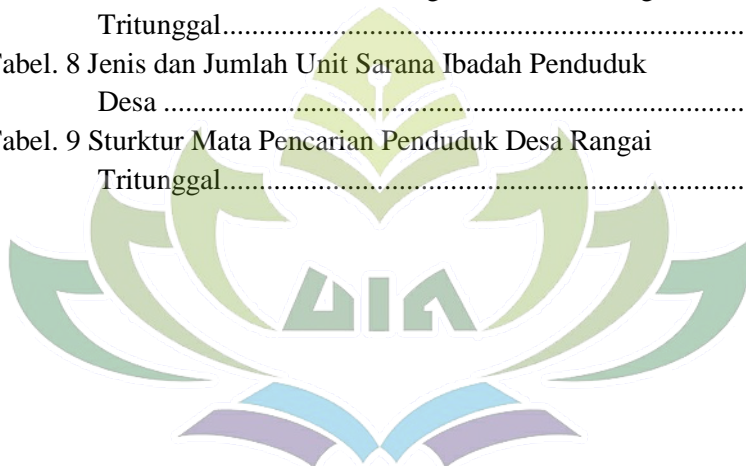
A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi	83

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Rangai Tritunggal.....	56
Tabel. 2 Jumlah Penduduk Dilihat Dari Data Lingkungan.....	57
Tabel. 3 Struktur Nama Kepala Desa	58
Tabel. 4 Jumlah Suku Desa Rangai Tritunggal	58
Tabel. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.....	59
Tabel . 6 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Rangai Tritunggal.....	60
Tabel. 7 Jenis dan Jumlah Pemeluk Agama di Desa Rangai Tritunggal.....	60
Tabel. 8 Jenis dan Jumlah Unit Sarana Ibadah Penduduk Desa	61
Tabel. 9 Sturktur Mata Pencarian Penduduk Desa Rangai Tritunggal.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah :

“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme dan Implementasi Pengambilan Keputusan Dalam Merencanakan Pembangunan Desa” (Studi di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam kajian ini yaitu tinjauan Fiqh Siyasah dalam ruang lingkup Siyasah Dusturiyah adalah peraturan tentang tingkah laku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.¹
2. Mekanisme adalah suatu cara kerja yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya untuk

¹H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Edisi Kedua* (Bandung : Prenada Media, 2003).73.

menghasilkan suatu hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.²

3. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program.³
4. Kepala Desa adalah suatu peran kepala pemerintahan Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan tugasnya menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, serta melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁴
5. Pembangunan merupakan Proses, usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta cara melaksanakan rancangan pembangunan Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.⁵

²APA: *mekanisme*. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil tanggal 15 Maret 2021, dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mekanisme>

³Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), 87.

⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat

(1).

⁵*Ibid*, Pasal 1 Ayat (8)

6. Desa Rangai Tritunggal merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.⁶ Dipilihnya Desa Rangai Tritunggal karena aspek strategis Desa Rangai Tritunggal tempat peneliti berdomisili sebagai salah satu masyarakat Desa yang sangat mengharapkan kemajuan yang lebih baik lagi di Desa nya yaitu dengan meninjau, mentelaah secara langsung legitimasi yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Desa Rangai Tritunggal.

Uraian istilah yang dimaksud penulis dalam judul di atas, adalah tinjauan Fiqh Siyasah dalam kajian Siyasah Dusturiyah terhadap pengambilan keputusan yang menunjang pelaksanaan pembangunan Desa Rangai Tritunggal.

B. Latar Belakang

Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Pembangunan Desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka

⁶https://Id.M.Wikipedia.Org/wiki/Rangai_Tri_Tunggal,_Katibung,_Lampung_Selatan Diakses Tanggal 02 Agustus 2020 Pukul 20.06

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)

mencapai tujuan bernegara. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional.⁸

Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan Desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Supaya pembangunan Desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan Desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan.

Pelaksanaan pembangunan Desa mensyaratkan adanya peran aktif Masyarakat, Perangkat Desa, Lembaga-Lembaga Desa, Lembaga ditingkat Kecamatan Dan Kabupaten (Lembaga Supra Desa), dan lain-lain. Proses Pembangunan Desa, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa perlu dilakukan agar arah pembangunan desa tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa.

Bab IV Kewenangan Desa Pasal 18 UU No.6 Tahun 2014 menerangkan bahwa: Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (2).

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Uraian data pasal tersebut masih sangat luas penafsirannya sehingga perlu dispesifikan lagi maka itu penjelasannya dicantumkan dalam Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Pembangunan infrastruktur di desa cenderung lambat dibandingkan di daerah perkotaan. Hal ini menjadikan penduduk desa melakukan eksodus ke perkotaan guna mencari perbaikan hidup yang tidak diperoleh di desa. Faktor pendukung tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu: Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Dukungan Pemerintah Daerah, Masyarakat Sosial Budaya, Gotong Royong, Musyawarah, Partisipasi, dan Sumber Daya Manusia,¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁰ Anthonius Welly, "Implementasi UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru

Desa Rangai Tritunggal merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah 2.431 Ha, digunakan untuk lahan pertanian sawah tadah hujan seluas 1.573 Ha, lading/tegalan seluas 260 Ha dan permukiman warga seluas 590 Ha.

Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung, memainkan peran yang signifikan. Di Desa Rangai Tritunggal banyak berdiri industri-industri BUMN dan swasta mulai dari skala kecil hingga besar, seperti PT.Semen Padang, PT.Indocement Lampung, PT.Holcim, PT. SSH, PT.Sumber Indah Perkasa, PT.Lampung Andalas hingga Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas (PLTU) & (PLTG). Inilah kiranya yang menjadi permasalahan pembangunan di Desa Rangai Tritunggal, karena adanya kepentingan dari beberapa pihak terkait pelaksanaan pembangunan industri atau pabrik tersebut mengakibatkan adanya pembangunan industri pabrik yang berdiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Contohnya pantai pasir putih yang bersebelahan langsung dengan pabrik semen dan pabrik minyak. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan terkait mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa Rangai Tritunggal.

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perangkat Desa, Aparat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Perangkat Desa bertanggung jawab penuh pada Kepala Desa.

Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹¹ Berdasarkan uraian di atas, Kepala Desa adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus menjalankan kepemimpinannya dengan baik.

Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Desa. Hal itu membuat Kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

. Dengan demikian melihat adanya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Merencanakan Pembangunan Desa

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat (1)

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih mengarahkan pada persoalan penentuan Hukum Islam yang terkait dengan Pengambilan Keputusan Kepala Desa Dalam Merencanakan Pembangunan Desa dan Implementasi terkait dengan hasil keputusan Kepala Desa. Karena adanya kepentingan masalah dari pelaksanaan pengambilan keputusan, penelitian ini difokuskan pada “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme dan Implementasi Pengambilan Keputusan Kepala Desa Dalam Merencanakan Pembangunan (Studi Di Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pengambilan keputusan dalam merencanakan pembangunan?
2. Bagaimana mekanisme dan implementasi pengambilan keputusan dalam merencanakan pembangunan Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam menunjukkan hasil penelitian pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya hasil

penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Mengetahui bagaimana mekanisme dan implementasi pengambilan keputusan Kepala Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan
2. Mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah dalam pengambilan keputusan Kepala Desa atau Pemimpin dalam hukum Islam

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi pembaca antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlihat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan Kepala Desa dalam merencanakan pembangunan di Desa Rangai Tritunggal. Serta mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai dengan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang mendalam bagi Pemertintah Desa serta memberikan manfaat bagi masyarakat baik yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Peneliti Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian terhadap judul ini, maka peneliti sampaikan beberapa penelusuran yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut :

Pertama, yaitu skripsi oleh Lisa Oktavia (2018) berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”. Penelitian yang dilakukan Lisa Oktavia ialah bagaimana peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Penggawa V Ulu dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Penggawa V Ulu. Kesimpulan penelitian ini terkait pelaksanaan pembangunan di Desa Penggawa V sebagai pemimpin pemerintahan Desa perannya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif kepala Pekon atau Peratin dalam menggerakan partisipasi masyarakat¹². Berbeda dengan skripsi di atas, karena dalam skripsi ini membahas tentang pengambilan keputusan dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah terutama siyasah dusturiyah, tidak meneliti peran yang dimiliki seseorang melainkan tentang mekanisme yang dilakukan dalam pengambilan keputusan.

¹² Oktavia Lisa. “Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan” (Skripsi, UIN Raden Intan, 2018), 58-59.

Kedua, yaitu skripsi oleh Anthonius Welly (2016) berjudul “Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Anlong Kabupaten Kutai Timur” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Anlong Kabupaten Kutai Timur untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Analong Kabupaten Kutai Timur. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, Hal tersebut dilihat dari Pelaksanaan tugas yang sesuai dengan program kerja Desa¹³ Berbeda dengan skripsi di atas, karena dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme pengambilan keputusannya, tidak terkait dengan faktor yang mendukung maupun yang menghambat.

Ketiga, yaitu skripsi oleh Ian Aji (2017) berjudul : “Undang-Undang Desa Sebagai Legitimasi Desa (Desa Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia)” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Undang-undang yang menegaskan posisi Desa secara politik artinya kedudukan Desa dalam struktur pemerintahan harus jelas apakah bagian dari kabupaten atau diberi kekuasaan otonom untuk pengembangan wilayahnya sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesejahteraan bagi Kepala Desa, Ketua RW Dan ketua RT sangat kurang, bagaimana tidak kewajiban yang banyak dan besar tanggung jawabnya namun tidak

¹³Welly Anthonius “Implementasi UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Anlong Kabupaten Kutai Timur” (Skripsi Universitas Mulawarman, 2016), 829-832.

seimbang hak yang diterimanya. Maka itulah semua pihak harus bekerja sama baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan penduduknya¹⁴. Berbeda dengan skripsi di atas, karena dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme pengambilan keputusan, tidak terkait dengan Undang-Undang Desa yang dijadikan legitimasi Desa.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dalam menggunakan pikiran secara seksama, untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang pengetahuan yang dilaksanakan untuk memperoleh data-data, fakta-fakta, secara sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran agar mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu menghantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik, karena metode penelitian merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis atau Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kaneah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik

¹⁴Ian Aji. “Undang-Undang Desa Sebagai Legitimasi Desa (Desa Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia)” (Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2017), 154-158.

masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁵ Penelitian ini dilakukan di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Penelitian ini terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis, yaitu penelitian yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang bagaimana mekanisme pengambilan keputusan oleh Kepala Desa dalam merencanakan pembangunan.¹⁶

2. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang menjadi penelitian.¹⁷ Pembahasan ini populasinya berjumlah 23 Orang terdiri dari 1 Orang Kepala Desa, 7 Orang Perangkat Desa, 13 Orang Kepala Dusun, 1 Orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 1

¹⁵Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*. (Yogyakarta : CV.Andi Offset,2010),21.

¹⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke-3*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 105.

¹⁷ Zainudin Ali, *Ibid*, 98

Orang Tokoh Agama, 1 Orang Tokoh Masyarakat Desa Rangai Tritunggal.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu dengan menentukan kriteria-kriteria berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang akan dibahas. Adapun yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang terdiri dari, kepala Desa 1 orang, perangkat Desa 4 orang, 3 kepala dusun, 1 tokoh agama, 1 tokoh masyarakat Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸ Data primer ini didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti wawancara yang akan dilakukan di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁸ Zainudin Ali, *Ibid*, 106.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi pustaka (*library research*) dari sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya berupa Al-Qur'an, Al-Hadist, buku-buku dan literature lainnya yang mendukung dalam permasalahan yang akan dibahas.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dibenarkan akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan.²⁰ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder.

Data primer dapat diperoleh dengan beberapa metode yaitu :

1) Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan

¹⁹ Zainudin Ali, *Ibid*, 177.

²⁰ Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian: Lengkap Praktis, dan Mudah Di Pahami* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 2014), 31.

untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas (pembyangan limbah ke laut), peristiwa, kejadian, objek, kondisi atau suasana tertentu.²¹

2) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²² Wawancara ini menggunakan teknik Purposive Sampling (non random) dan dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang terjadi. Data wawancara dapat diperoleh dari kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat Desa Rangai Tritunggal serta beberapa pihak yang dianggap paling tahu dalam penelitian ini. Agar wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah pelaksanaannya maka perlu melakukan pedoman wawancara, yaitu berupa garis besar materi wawancara yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan.

3) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, dan

²¹ Sujarweni, V. Wiratna, *Ibid*, 32.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), 95.

sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.²³ Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai legitimasi kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan.

a. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer.²⁴ Data sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka (*library research*) berupa Al-Qur'an, Al-Hadist, pendapat para ulama, buku-buku fiqh, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen serta karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum menggunakan teknik induktif yang menjadi objek kajian penelitian.²⁵

²³ Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian: Lengkap Praktis, dan Mudah Di Pahami*, 33.

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke-3*, 106.

²⁵ Zainudin Ali, *Ibid*, 177.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan

Pada BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penelitian

BAB II. Landasan Teori

Memuat uraian tentang deskripsi teori-teori yang didasarkan pada literatur primer dan dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

BAB III. Deskripsi Objek Penelitian

Memuat secara rinci gambaran umum objek dan penyajian umum fakta dan data terkait penelitian.

BAB IV. Analisis Penelitian

Memuat hasil analisis data penelitian dan temuan di lapangan terkait dengan penelitian.

BAB V. Penutup

Bab terakhir berisi simpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan

BAB II

LANDASAN TEORI

a. Pemimpin dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pemimpin

Pemimpin di dalam hukum Islam bisa diartikan dengan *imamah*, *khalifah*, dan *ulil amri*. Adapun kata-kata *imamah* ditakrifkan oleh Al-Mawardi dengan : “*Imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.*”²⁶ Dalam sejarah Islam, gelar *khalifah* banyak digunakan daripada *imam*.

Perkataan *khalifah* yang telah banyak disinggung dalam uraian- uraian terdahulu pada dasarnya berarti pengganti atau wakil. Pemakaian perkataan *khalifah* menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan *amir* (yang jamaknya *umara*), disebut juga penguasa. Dengan demikian kedua perkataan tersebut dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin.

Abu bakar ash-shidiq disebut *khalifah*, demikian pula Umar Ibnu al-Khattab, Ali dan Usman. Bahkan gelar *khalifah* ini digunakan pula di kalangan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pemimpin di dalam hukum Islam bisa diartikan dengan *ulil amri*. Ulil Amri oleh ahli Al-Qur’an Nazwar Syamsu, diterjemahkan sebagai *functionaries*, orang yang mengemban tugas, atau disertai menjalankan fungsi tertentu dalam suatu

²⁶ Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 37.

organisasi. Konsep Ulil Amri adalah keberagaman pengertian yang terkandung kata *amr*. Kata *amr* biasanya diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh Tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.²⁷

Konsep Islam, kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian, dalam teori manajemen, fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan (*planning and decision maker*), pengorganisasian (*organization*), kepemimpinan dan motivasi (*leading and motivation*), pengawasan (*controlling*), dan lain lain.²⁸

Kemestian pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya diriwayatkan oleh Hadist berikut

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ²⁹

Dari Abdullah, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda : “*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap*

²⁷ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), 16.

²⁸ Zaini Muhtaram, *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Al-Amin dan IKFA, 1996), 73

²⁹ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab: Hadis Jum'at Bab: Shalat Jum'at di Desa dan Kota, Nomor : 844 (Beirut: Dar al-Sha'bu, t.t), 139.

kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya” (H.R Bukhari)

Kata-kata *amir* tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an meskipun kata *amara* banyak disebut Al-Qur'an, yang mengarah kepada pemimpin adalah kata *ulil amri* meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri* ini, ada yang menafsirkan dengan kepala Negara, pemerintah, atau tugas untuk seorang pemimpin dari Tuhannya, dan wajib untuk dilaksanakan. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari sisi *fiqh dusturiyah* adalah *ahlul halli wal aqdi*. Akan tetapi kata-kata *amir* digunakan dalam hadis dan rupanya juga dikenal di kalangan para sahabat. Karena waktu terjadi musyawarah di Tsaqifah Bani Saidah membicarakan pengganti Rasulullah dalam mengurus agama dan mengatur urusan keduniawian.³⁰

Ulil amri adalah para pemimpin. Perintah untuk taat kepada pemimpin menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin. Karena Allah SWT tidak akan memerintahkan taat kepada seseorang yang tidak ada wujudnya, dan juga tidak mewajibkan taat kepada orang yang keberadaannya mandub (*sunnah*).

³⁰H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Kedua, 126.

Perintah untuk taat kepada *Ulil amri* menuntut perintah untuk mewujudkan *Ulil amri*. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin adalah kewajiban bagi mereka.³¹

Ada beberapa definisi *ulil amri* menurut ulama fiqh, antara lain:

Ibnu Qayyim menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: “*ulil amri* adalah para ulama”. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: “Mereka adalah para Pemimpin”

Ibnu Taimiyah, *ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kemampuan dan kekuasaan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, *ulil amri* ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun apabila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula

Syaikh Mahmud Syaltut berkata, *ulil amri* adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau kekuatan argumentasi.³²

³¹ Abdullah Ad-Dumadji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, 57-58.

³² Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 83.

Pemimpin yang baik akan membawa kebaikan untuk seluruh umatnya, dan pemimpin yang jahat akan membawa celaka untuk umatnya, itulah arti pemimpin sesungguhnya, maka wajib bagi kita untuk menaati pemimpin yang baik dan menegur seorang pemimpin yang melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Arti pemimpin adalah seorang kepala negara yang menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Sesungguhnya Allah SWT berfirman tentang penguasa-penguasa di bumi yang terdapat dalam Q.S Al-An'am ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya : *“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* (Q.S Al-An'am (6) : 165)

2. Dasar Konseptual Kepemimpinan Perspektif Islam

Islam menawarkan konsep mengenai kepemimpinan. Untuk memahami dasar konseptual dalam perspektif Islam paling tidak harus digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, historis, dan teoretik.³³

a. Pendekatan Normatif

Dasar konseptual kepemimpinan Islam secara normatif bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis dan terbagi atas empat prinsip pokok, yaitu:

- 1) Prinsip Tanggung Jawab
- 2) Prinsip Etika Tauhid
- 3) Prinsip Keadilan
- 4) Prinsip Kesederhanaan³⁴

Prinsip-prinsip ini dapat dilihat dari Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Bunyi Hadist tersebut adalah :

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا تَقَضَّى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِيَ لَالَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda:
“Apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui

³³ Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 10.

³⁴ *Ibid*, 11.

*bagaimana harus memutuskan hukum” Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*³⁵

b. Pendekatan Historis

Al-Qur'an begitu kaya dengan kisah-kisah umat masa lalu sebagai pelajaran dan bahan perenungan bagi umat yang akan datang. Dengan pendekatan historis ini diharapkan lahir pemimpin-pemimpin Islam yang memiliki sifat *sidiq*, amanah, *tabligh*, *fathonah*, dan lain-lain sebagai syarat keberhasilannya dalam memimpin. *Sidiq* yang memiliki arti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, *tabligh* berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan *fathonah* berarti cerdas dalam mengelola masyarakat.

c. Pendekatan Teoretik

Ideologi Islam adalah ideologi yang terbuka. Hal ini mengandung arti walaupun dasar-dasar konseptual yang ada di dalam bangunan ideologi Islam sendiri sudah sempurna, namun Islam tidak menutupi kesempatan mengomunikasikan ide-ide dan pemikiran-pemikiran diluar Islam selama pemikiran itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah. Pengembangan ilmu pengetahuan, Islam sangat dianjurkan mengingat permasalahan dari zaman ke zaman akan selalu bertambah dan sejarah Islam mencatat setiap zaman akan lahir

³⁵ Al Asqalani, Al Hafidz bin Hajar, *Kitab Bulughul Maram*, Nomor Hadis: 1416. (Indonesia : Darul Ahya Al-Kitab Al-Arabiyyah), 663.

pembaharu-pembaharu pemikiran Islam yang membangun dasar-dasar konseptual yang relevan dengan zamannya.³⁶

Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَآنْفَضُوهَا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”(Q.S Ali-Imran (3) : 159)

3. Syarat-Syarat Pemimpin

Jabatan tertinggi dalam tatanan negara Islam adalah jabatan al- Khalifah atau Al-Imam, maka sudah suatu yang wajib „aqli maupun syar“i untuk tidak memilih orang yang tidak memiliki kapabilitas dalam

³⁶ Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Ibid, 12.

mengatur urusan negara. Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para *fuqaha* atau *ulama-ulama* Islam telah menetapkan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Imam atau pemimpin. Beberapa berbagai pendapat para ulama tentang syarat-syarat tersebut, Menurut Al-Kamal bin Aby Syarif dan Al-Kamal bin Al-Hamam, adalah :

- a. Laki-laki.
- b. *Wara*'' (adil serta meninggalkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan konsekuensi kearah kefasikan).
- c. *Ilmu*'' (memiliki ilmu pengetahuan mendalam terhadap masalah teologi dan fiqih).
- d. Memiliki kepabilitas sebagai pemimpin.
- e. Keturunan Quraisy.
- f. *Tertaklif* (baliqh dan berakal).
- g. Bukan budak belian
- h. Mujtahid.³⁷

4. Tugas dan Kewajiban Pemimpin

Pemimpin juga mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan kewajiban pemimpin menurut Imam Al-Mawardi antara lain:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa- apa yang telah disepakati oleh umat salaf

³⁷ H.B. Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam* (Serang Banten: FSEI PRESS, 2010), 45.

- b. Mentafidkan hukum-hukum di antara orang-orang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia agar dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah SWT, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- g. Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh

orang yang jujur.

- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.³⁸

Menurut Yusuf Musa kewajiban pemimpin yang lain, yaitu: menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.³⁹

Yusuf Musa juga menambahkan mengutip pendapat Al-Mawardi yang menjelaskan tentang sepuluh kewajiban pokok tentang kepala negara. Dari sepuluh kewajiban versi Al-Mawardi, Yusuf Musa menyimpulkan dua kewajiban pokok, yaitu:

- a. Menegakkan agama, menjelaskan hukum dan ajarannya kepada seluruh umat manusia
- b. Mengatur kepentingan negara sesuai dengan tuntutan, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun masyarakat baik urusan kedalam maupun urusan keluar.⁴⁰

Berpijak pada tugas dan kewajiban pemimpin, menurut Yusuf Musa adalah setiap hak harus diimbangi dengan kewajiban, maka seseorang tidak akan menuntut haknya sebelum dia memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, maka dapat terjalin berbagai hubungan antara manusia yang didasarkan kepada prinsip-prinsip yang kuat, adil, dan sehat. Islam lebih banyak membicarakan kewajiban dari pada hak.⁴¹

³⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu- Rambu Syariah, Edisi Kedua*. 61-62.

³⁹ *Ibid*. 64.

⁴⁰ Masyhud, "Kewajiban dan Hak Kepala Negara Dalam Prespektif Hukum Islam," *Al-Manahij*, no. 1 (2012): 79.

⁴¹ *Ibid*, 72.

Pada prinsipnya kewajiban kepala negara, dititik beratkan pada pemeliharaan agama, dengan terwujudnya syari'ah dalam kehidupan masyarakat, serta mengatur kehidupan duniawi yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Menurut Ibnu Taimiyah kewajiban kepala negara atau seorang pemimpin adalah amanah, jujur, adil, menyelenggarakan jihad dan dakwah serta melaksanakan musyawarah.⁴²

Pemimpin memiliki hak sebagai hubungan timbal balik dari kewajiban yang ia laksanakan. Hak tersebut adalah seluruh rakyat wajib taat dan patuh kepadanya, hak mendapat bantuan atau partisipasi masyarakat dan hak memperoleh biaya hidup dirinya, keluarganya dan orang yang menjadi tanggungannya secara patut.

Pemimpin harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dengan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui *kas al-halal*, hak beragama, dan hak lain-lain.⁴³

Pada dasarnya yang disebut dengan pemimpin adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban untuk rakyat adalah untuk taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.⁴⁴

5. Karakteristik Kepemimpinan Islam

Pemimpin ideal menurut Islam erat kaitannya

⁴² *Ibid*, 77.

⁴³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu- Rambu Syariah Edisi Kedua*, 63.

⁴⁴ *Ibid*, h. 64

dengan figur Rasulullah Saw. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah Saw merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Sesungguhnya teladan yang menjadi contoh konkrit dalam bidang etika adalah baginda Nabi Muhammad S.A.W Sesungguhnya Allah berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا

اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : “*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah*” (Q.S Al-Ahzab (33) : 21)

Para ulama telah lama menelusuri Al-Quran dan Hadits dan menyimpulkan minimal ada empat kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Sifat yang dimaksud dikenal dengan sebutan sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul merupakan pencerminan karakter Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Secara rinci sifat-sifat tersebut sebagai berikut: 1. Shiddiq

Nabi Muhammad saw. mempunyai banyak sifat yang membuatnya disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan yang membuatnya menjadi pujaan para pengikutnya. Sewaktu mudanya, semua

orang Quraisy menamakannya “*shiddiq*” dan “*amin*”.⁴⁵ Beliau sangat dihargai dan dihormati oleh semua orang termasuk para pemimpin Mekkah.

Nabi Muhammad memiliki kepribadian dan kekuatan bicara, yang demikian memikat dan menonjol sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan dan ketulusan dan kejujuran pesannya. Hal ini dikarenakan, Nabi Muhammad saw. hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau. Dalam kepemimpinannya berarti semua keputusan, perintah dan larangan beliau agar orang lain berbuat atau meninggalkannya pasti benar karena Nabi bermaksud mewujudkan kebenaran dari Allah swt. Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan.⁴⁶

2. Amanah

Karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin sebagaimana karakter yang dimiliki Rasul yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar *al-Amin* (yang dapat dipercaya). Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas pemimpin umat atau Nabi-Nabi terdahulu. Pemimpin yang amanah yakni pemimpin yang benar-benar bertanggungjawab pada amanah, tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah swt. Firman Allah yang berbicara

⁴⁵Fazalur Rahman, *Nabi Muhammad saw. Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, terj. Annas Siddik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 68.

⁴⁶ Abdul Wahid Khan, *Rasulullah Di Mata Sarjana Barat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 79.

tentang amanah yang diemban oleh setiap manusia terdapat dalam Q.S Al-Ahzab ayat 72 sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ

كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh" (QS. Al-Ahzab (33) : 72)

Berdasarkan ayat di atas menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt, walau sekecil apapun amanat itu. Sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad saw, memberi bukti bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena mampu memelihara kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan sebaliknya selalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Begitulah kenyataannya bahwa setiap firman selalu disampaikan Nabi sebagaimana difirmankan kepada beliau. Dalam peperangan beliau tidak pernah mengurangi harta rampasan untuk kepentingan sendiri, tidak pernah menyebarkan aib seseorang yang datang meminta nasihat dan petunjuknya dalam

menyelesaikannya dan lain-lain.⁴⁷ Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Amanah erat kaitannya dengan tanggung jawab. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang bertanggung jawab.

3. Tabligh

Predikat *mundhir* yang disandang menuntut beliau untuk menguasai informasi agar dapat memimpin umatnya serta bertugas untuk menyampaikan (*tabligh*) risalah kepada manusia. Penyelenggaraan proses dakwah yang dilakukan Rasulullah itu benar-benar dihasilkan dari hasil pemikiran dan perhitungan yang cermat mengenai beberapa kejadian yang akan terjadi serta melakukan pengamatan-pengamatan terhadap situasi dan kondisi yang ada. Beliau juga sangat memerhatikan cara-cara yang teratur dan logis untuk mengungkapkan permasalahan yang hendak mereka sampaikan. Hal ini terlihat ketika akan melakukan dakwahnya, beliau mula-mula menentukan tempat yang kondusif, memanggil orang-orang yang akan diseru, kemudian beliau mengungkapkan persoalan yang tidak mungkin diperselisihkan oleh siapa pun.⁴⁸ Kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas ketiga yang harus dimiliki oleh pemimpin sejati. Pemimpin dituntut untuk membuka diri kepada rakyatnya, sehingga mendapat simpati dan juga rasa cinta. *Tabligh* juga dapat diartikan sebagai akuntabel, atau terbuka untuk dinilai. Sehingga,

⁴⁷ Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Cet IV, (Jakarta: Kencana, 2015), 58.

⁴⁸ *Ibid*, 48.

akuntabilitas merupakan bagian melekat dari kredibilitas. Bertambah baik dan benar akuntabilitas yang kita miliki, bertambah besar tabungan kredibilitas sebagai hasil dari setoran kepercayaan orang-orang kepada pemimpinnya.

4. Fathanah

Fathanah merupakan sifat Rasul yang keempat, yaitu akal yang panjang sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah dalam dua keadaan, baik itu dimasa keemasan dan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana. Sifat pemimpin adalah cerdas dan mengetahui dengan jelas apa akar permasalahan yang dia hadapi serta tindakan apa yang harus dia ambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada umat. Sang pemimpin harus mampu memahami betul apa saja bagian-bagian dalam sistem suatu organisasi/lembaga tersebut, kemudian ia menyelaraskan bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan strategi untuk mencapai sisi yang telah digariskan.⁴⁹ Kecerdasan pemimpin tentunya ditopang dengan keilmuan yang tinggi Ilmu bagi pemimpin yang cerdas merupakan bahan bakar untuk terus melaju di atas roda kepemimpinannya. Pemimpin yang cerdas selalu haus akan ilmu, karena baginya hanya dengan keimanan dan keilmuan dia akan memiliki derajat tinggi di mata manusia dan juga pencipta. Kecerdasan pemimpin akan membantu-nya dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemimpin yang

⁴⁹ Devitasari, dkk, *Isu-Isu Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 530.

cerdas tidak mudah frustasi menghadapi problema, karena dengan kecerdasannya dia akan mampu mencari solusi.

Rasulullah Saw memerintahkan kepada kita untuk mengangkat seorang pemimpin walaupun dalam komunitas yang paling kecilpun dan sasaranya sangat sederhana. Sebagaiman beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ».. ((رواه أبو داود))

Artinya : “ketika 3 orang keluar melakukan perjalanan, maka perintahkanlah salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin” (HR Abu Daud, t.t:340, No.Hadits 2610 Bab Fi al-Kaum Yusafiru, juz III)⁵⁰

Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola organisasi atau perusahaan. Al-qur'an dan As-sunnah dalam permasalahan ini telah mengisyaratkan beberapa prinsip pokok dan tata nilai yang berkaitan dengan kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, perusahaan termasuk di dalamnya ada manajemen usaha yang nota-benanya merupakan kontrak sosial. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut antara lain

⁵⁰ Sulaiman, Abu Dawud, tt, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, No.Hadits 2610 Bab Fi al-Kaum Yusafiru Juz III.

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam. Sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan suatu umat. Sebab itu, Islam mengajak ke arah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, yaitu tauhid. Dalam al-Qur'an sendiri dapat ditemukan dalam surat An- Nisa': 48, Ali Imran: 64 dan surat Al-Ikhlâs. Dalam QS An-Nisa: 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar.(QS An-Nisa: 48)

b. Prinsip Musyawarah

Musyawarah berarti mempunyai makna mengeluarkan atau mengajukan pendapat. Dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat, paling tidak mempunyai tiga cara: 1) Keputusan yang ditetapkan oleh penguasa; 2) keputusan yang ditetapkan pandangan minoritas; dan 3) keputusan yang ditetapkan oleh pandangan mayoritas, ini menjadi ciri

umum dari suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini sebagaimana terdapat pada surat Ali-Imran: 15

قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ ۖ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ
جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

Artinya : "Katakanlah: "Inginkah Aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.(QS Ali-Imran: 15)

c. Prinsip Keadilan (*al-‘Adalah*)

Keadilan adalah kata jadian dari kata “adil” yang terambil dari bahasa Arab *‘adl*. Kamus- kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama” atau “persamaan.” Persamaan yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak,” dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar,” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang.

B. Pemimpin Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

1. Pengertian Kepala Desa

Pemerintahan Desa dalam Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵¹ Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa.⁵²

Desa dipimpin oleh seorang kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat Desa. Kepala Desa adalah pemerintah Desa yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai penyelenggara pemerintahan Desa untuk melaksanakan kewenangan Desa.⁵³

Pengertian Desa dalam peraturan perundang-undangan sejak era reformasi regulasi yang mengatur tentang Desa terdiri dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

⁵¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat (2).

⁵² Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Aura Publishing, 2017),131.

⁵³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Ibid*, pasal 1 ayat (2).

istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan alasan filosofis, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan Desa mulai dari pasal 200 sampai dengan Pasal 216. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa diberi pengertian yaitu “Desa atau dengan istilah lain, selanjutnya disebut Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sampai dengan lahirnya Undang-Undang baru tentang Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) yaitu: “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah istilah Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya Kampung (Banten, Jawa Barat), atau Dusun

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *pasal 1* huruf (o)

(Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau Jorong (Sumatera Barat). Sedangkan di Daerah Lampung di beberapa Kabupaten istilah Desa disebut dengan Pekon⁵⁵.

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa, BPD serta Perangkat Desa

Kepala Desa dalam pemerintahan Desa mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa berwenang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan- nya agar mencapai

⁵⁵<https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pekon> (Diakses pada 01 Maret 2021, Pukul 20.31).

perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan di atas menjadikan landasan kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala Pemerintahan Desa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat 1 mengatakan bahwa salah satu tugas dari Kepala Desa yaitu melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan tugas dan wewenang Kepala Desa bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin harus memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum pasal 1, yakni: pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (8) bahwa pembangunan Desa adalah upaya

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁵⁶

Pasal 48 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa disebutkan bahwa perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan bertanggung jawab penuh kepada Kepala Desa.⁵⁷

Sedangkan dalam Pasal 55 Bagian Ketujuh Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kepala Desa bersama Kepala Desa
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

Untuk melaksanakan fungsi tersebut BPD diberikan hak pada pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

⁵⁶ Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, 133.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Ibid*, pasal 48 .

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sedangkan anggota diberikan hak dan kewajiban dan larangan sebagai berikut: Pasal 62 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa⁵⁸

3. Kewajiban Kepala Desa Dalam Pembangunan

Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 Ayat (4) yaitu Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Ibid*, pasal 62.

- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.⁵⁹

Kewenangan, hak, kewajiban kepala Desa masih dibebani sebuah kewajiban kepada pemerintahan Kabupaten/Kota. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam Pasal 26, bahwa kepala Desa wajib:

- 1) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- 2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- 3) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- 4) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.⁶⁰

Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa harus menegakkan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban kepala Desa bahwa kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kepala desa diharapkan dapat menjalankan pemerintahan Desa sesuai dengan

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Ibid*, Pasal 26 Ayat (4)

⁶⁰ Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, *Ibid*, 136.

Tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memiliki 16 Bab, 122 pasal tentang Desa.

4. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran pemimpin dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.⁶¹

Adapun peran kepemimpinan dapat pula dibagi menjadi:

- a. Pemimpin masa depan harus fleksibel dan mempunyai pengalaman yang luas.
- b. Menganggap tanggung jawab “seremonial” atau “spiritual” sebagai kepala organisasi menjadi suatu fungsi yang diperlukan, bukan suatu hal yang remeh yang harus dialami atau didelegasikan kepada orang lain.
- c. Pembuatan tidak lagi dibuat secara efektif terpusat di puncak organisasi. Agar pemimpin dapat berperan perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:
 - 1) Bahwa yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan seseorang bukan pengangkatan atau penunjukannya selaku

⁶¹Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 148.

“kepala”, akan tetapi penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan.

- 2) Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang.
- 3) Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk “membaca” situasi.
- 4) Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan.
- 5) Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi.⁶²

Covey membagi peran pemimpin menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Pathfinding* (pencarian alur); peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
- b. *Aligning* (penyelarasan); peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
- c. *Empowering* (pemberdaya); peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apa pun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang

⁶² *Ibid*, 149-150.

disepakati.⁶³

Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Demikian, dapat dikatakan bahwa, jika pemimpin tidak dapat membuat keputusan maka dia (seharusnya) tidak dapat menjadi pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku, mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil baik atau buruk tidak hanya dinilai setelah konsekuensinya terjadi, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya.⁶⁴

Sejak pembangunan Desa menjadi prioritas Negara, masyarakat Desa semestinya sudah akrab dengan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hingga Rakorbagnas, tetapi keputusan tentang kebijakan dan program pembangunan Desa tetap terpusat dan bersifat seragam untuk seluruh wilayah di Indonesia. Perencanaan yang terpusat itupun disertai dengan berbagai macam bentuk proyek bantuan pembangunan Desa, yang bersifat spasial atau yang biasa disebut dengan bantuan Desa. Namun, konsep “bantuan” ternyata dalam kenyataan di lapangan tidak memberdayakan, kenyataannya sebaliknya hal tersebut menciptakan kultur ketergantungan atau kultur meminta yang timbul di masyarakat.⁶⁵

⁶³Wahyudin Nur Nasution, “Kepemimpinan Pendidikan di Sekolah,” *Jurnal Tarbiyah*, (Vol 22, No.1 2015), 71.

⁶⁴ Veithzal Rivai, Bachtiar, Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi* (Depok: Rajawali Pers, 2014). 392-398.

⁶⁵ Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, Ibid, 118.

Terdapat tiga hal yang justru memperlemah kemandirian dan kapasitas Desa. *Pertama*, Baik UU No.32/2004 maupun UU No.25/2004 sama sekali tidak menempatkan Desa sebagai entitas yang terhormat dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sementara PP 72/2005 (turunan dari UU No.32/2004) justru yang memperkenalkan istilah perencanaan Desa, tetapi konsep yang dikemukakan bukanlah perencanaan otonom, melainkan perencanaan sebagai bagian (subsistem) dari perencanaan daerah. Desa didalam konteks ini hanya “bertugas” menyampaikan usulan sebagai input perencanaan, bukan “berwenang” mengambil keputusan secara otonom dalam menyusun perencanaan Desa.⁶⁶ Hal tersebut bertolak belakang terhadap Kepala Desa yang dalam pemerintahan Desa adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Desa, kepala Desa adalah *central authority* (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan. Sebab keberhasilan suatu Desa ada kaitannya dengan peran kepala Desa itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya.

Kedua, secara metodologis perencanaan daerah mengandung kesenjangan antara “hasil sektoral” dengan “proses spasial”. Tetapi prosesnya yang terjadi menggunakan pendekatan spasial, yaitu melalui Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).⁶⁷ Dalam Musrenbangdes masyarakat tidak mempunyai kapasitas untuk menjangkau isu-isu sektoral. Sedangkan kapasitas masyarakat hanya menjangkau

⁶⁶ *Ibid*, 120.

⁶⁷ *Ibid*, 121.

masalah prasarana fisik di lingkungan mereka. Masyarakat merasa tidak mungkin menyampaikan usulan-usulan yang lebih luas. Kesenjangan itu terjadi karena Desa tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur berbagai sektor pembangunan.

Ketiga, Perencanaan pembangunan di tingkat Desa belum partisipatif. Peran elite Desa yang mengklaim mewakili aspirasi masyarakat masih mendominasi kekuatan dalam menentukan kebijakan pembangunan Desa. *Stakeholders* yang terlibat dalam perencanaan pembangunan masih berkuat pada aktor pemerintahan Desa dan lembaga formal di tingkat Desa (lurah, BPD, LPM, PKK, RT, dan Kepala Dusun).⁶⁸ Keterlibatan organisasi-organisasi sekorat, organisasi kemasyarakatan yang lain, dan kelompok perempuan masih sangat terbatas. Terkadang aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui RT atau Kadus tak tersampaikan dengan baik dan sebenar-benarnya.

Hal ini dikarenakan kepala Desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan orang yang paling menguasai lapangan.⁶⁹ Dimana dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas kedudukan kepala Desa sebagai seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa

⁶⁸ *Ibid*, 123.

⁶⁹ Johara T. Jayadinata dan Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, (Bandung: ITB, 2006). 99.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Ibid*, Pasal 1 Ayat (8).

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Ad-Dumaiji,. *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abdul Wahid Khan, *Rasulullah Di Mata Sarjana Barat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002)
- Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab: Hadis Jum'at Bab: Shalat Jum'at di Desa dan Kota, Nomor: 844 (Beirut: Dar al-Sha'bu, t.t)
- Abu Dawud Sulaiman t.t, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar- al Kitab al-Arabi No. Hadis 2610 Bab Fi al-Kaum Yusafiru Juz III.
- APA: *mekanisme*. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil tanggal 15 maret 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Al Hafidz bin Hajar, Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul Ahya Al-Kitab Al-Arabiyyah
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Anthony Welly 2016, Implementasi UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Anclong Kabupaten Kutai Timur, Skripsi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- C.S.T Kansil *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Deddy Mulyadi, Veithzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

- Devitasari, dkk, *Isu-isu Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021)
- Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*. (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010).
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005).
- Fazalur Rahman, *Nabi Muhammad Saw. Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, terj. Annas Siddik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Firman Sujadi, Dian Achmad, Ambarjaya Beni S, Rahmatia Diah, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Buku Kedua tentang Tata Kelola Keuangan Dan Pembangunan Desa*, (Jakarta : Bee Media Pustaka, 2016).
- Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993)
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002)
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu- Rambu Syariah*. Edisi Kedua. (Bandung: Prenada Media, 2003)
- H.B Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam* (Serang Banten: FSEI PRESS, 2010).
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rangai_Tri_Tunggal,_Katibung,_Lampung_Selatan Diakses Tanggal 02 Agustus 2020 Pukul 20.06
- Ian Aji, 2017, *Undang-Undang Desa Sebagai Legitimasi Desa (Desa Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, Skripsi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

- Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Johara T. Jayadinata dan Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, (Bandung: ITB, 2006).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 1971.
- Lisa Oktavia, 2018, Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan, repository Skripsi Uin Raden Intan Lampung. 58-59.
- Masyhud, “Kewajiban dan Hak Kepala Negara dalam Prespektif Hukum Islam”, *Al-Manahij*, No.1 (2012)
- Mamduh Hanafi, *Manajemen Keuangan Interasional*, (Yogyakarta: BPFE, 2004)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Mohammad Taufik Makarao, Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2011)
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Cet Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014)
- Muhammad Zid, Ahmad Tarmiji, *Sosiologi Pedesaan*, (Depok: Raja Gtafindo Persada, 2016
- Muhtaram Zaini, *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Al amin dan IKFA, 1996)
- Rudi Santoso, Agus Hermanto, “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia)”, Nizham Journal of Islamic Studies, p. 125-135, may 2020

Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008)

Sujarweni Wiratna V, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis, dan Mudah Di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Veitzal Al, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. (Jakarta: Raja Pers, 2013)

Veithzal Rivai, Boy Rafli Amar, *Pemimpinan dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2014).

Wahyu Ilahi, Munir, *Manajemen Dakwah*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2015)

Wahyudin Nur Nasution, “Kepemimpinan Pendidikan di Sekolah,” *Jurnal Tarbiyah*, (No.1 2015)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke-3*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Perpustakaan Nasional; Aura Publishing, 2017).

merupakan tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa dengan melibatkan badan permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.⁷¹

Peran kepala Desa dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya serta bertanggung jawab terhadap pembangunan Desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa memiliki peran dalam kepemimpinannya mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan Desa.



⁷¹ Sujadi Firman, Dian Achmad, Ambarjaya Beni S, Rahmatia Diah, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Buku Kedua tentang Tata Kelola Keuangan Dan Pembangunan Desa*, (Jakarta : Bee Media Pustaka, 2016), 66